

Kajian Formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang

Nurani Nurul Hidayati¹, Nurini²

Diterima : 24 Juli 2014

Disetujui : 11 Agustus 2014

ABSTRACT

Formalization of street vendors in the city of Semarang such official site at Waru Market Area in Kaligawe to accommodate that activities. In 2007, the market is prepared to accommodate the relocated Waru merchants of Kartini, Progo and Citarum with klithikan specialties, food of birds and animals. Now, Waru Market conditions have not been developed due to various constraints including accessibility and flooding. Research question of this study is the extent of formalization of street vendors's role in Waru Market Semarang. This study utilities was qualitative manner with the purposive sampling methods. The results of this study which is the location of the formalization in the Waru Market area less suited to support existing activities. The supply - demand occurred imbalance because services scale market waru still level environment was not compared to demand inflicted. Nevertheless, some traders chose to remain on the grounds selling operating license in accordance with the government so as to provide the most tangible benefits of formalizing the creation of security and comforts for traders. Types of goods and capital will affect the sustainability of the activity of traders, like Klithikan better able to survive in this Waru Market area. Government efforts required as space conditioning goods vendors according to the characteristics and the provision of accessibility to the partnership to be able to support the activities of traders.

Keywords: formalization, street vendors, activity

ABSTRAK

Formalisasi PKL di Kota Semarang dilakukan dengan membangun lokasi resmi seperti Kawasan Pasar Waru di Jalan Kaligawe untuk menampung aktivitasnya. Pada tahun 2007, Pasar Waru dipersiapkan untuk menampung pindahan pedagang dari Jalan Kartini, Progo dan Citarum dengan spesialisasi klithikan, makanan burung dan hewan. Namun, hingga saat ini kondisi Pasar Waru belum berkembang karena berbagai kendala termasuk aksesibilitas dan banjir. Pertanyaan penelitian dari permasalahan yang ada yakni sejauh mana keberhasilan peranan formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode purposive sampling untuk penentuan narasumber. Hasil dari penelitian ini yakni lokasi formalisasi PKL di Kawasan Pasar Waru kurang sesuai untuk mendukung aktivitas yang ada. Terjadi ketidakseimbangan supply - demand karena skala pelayanan Pasar Waru yang masih bertaraf lingkungan, tidak sebanding dengan demand yang ditimbulkan. Di sisi lain, sebagian pedagang memilih untuk tetap berjualan dengan alasan izin usaha dari pemerintah sehingga memberikan manfaat formalisasi berupa terciptanya keamanan dan kenyamanan pedagang. Jenis barang dan modal usaha akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas pedagang, sehingga pedagang jenis klithikan lebih mampu bertahan di Kawasan Pasar Waru ini. Diperlukan upaya pemerintah seperti pengkondisian ruang PKL sesuai karakteristik barang dagangan dan penyediaan aksesibilitas dengan kemitraan sehingga mampu menunjang aktivitas pedagang.

Kata kunci: formalisasi, PKL, aktivitas

¹ Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

² Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

Kontak Penulis : nunu_velocity_22@yahoo.com

PENDAHULUAN

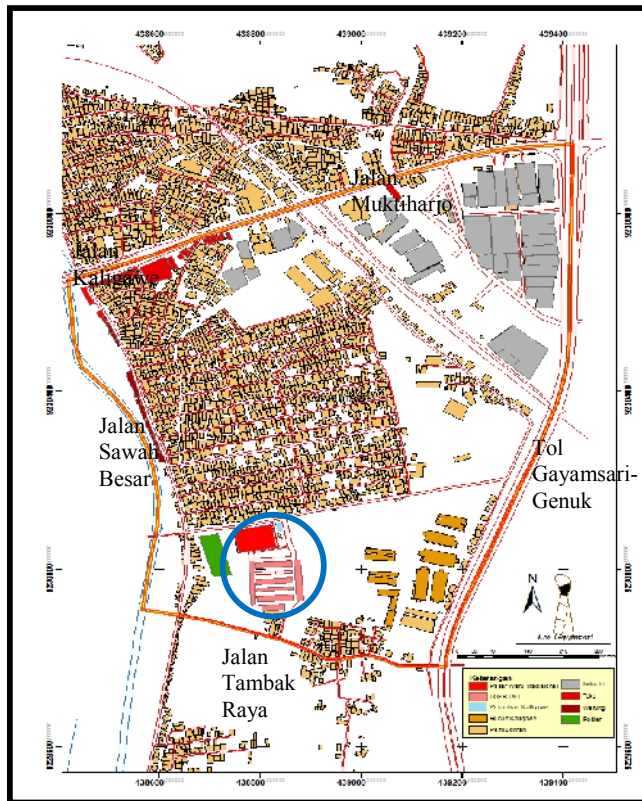
Pedagang kaki lima termasuk dalam sektor informal karena memiliki karakteristik dan kekhasan dalam pengelolaan aktivitas maupun cara berlokasinya. PKL merupakan subgroup terbesar dengan representasi antara 10-35% dari pekerja non pertanian. Pada negara berkembang seperti di Asia Tenggara, keberadaan PKL sering terdiskriminasi sebagai *unappreciated role* karena keberadaannya mengokupansi ruang publik (Recio, 2013). Salah satu bentuk upaya akomodatif yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan ruang yang difungsikan untuk menampung aktivitas para PKL baik dengan pengaturan aktivitas maupun formalisasi aktivitas PKL. Di Kota Semarang, formalisasi PKL telah dilakukan sebelumnya seperti pada Simpang Lima Semarang yang mengalami keberhasilan. Formalisasi pedagang diindikasikan berdasar pada kriteria sarana berdagang dan tempat usaha, organisasi, omzet serta kualitas barang yang terjamin (Surya, 2013). Formalisasi PKL lain di Kota Semarang terdapat pada kawasan Pasar Waru. Pedagang pasar ini berasal dari berbagai daerah di Kota Semarang khususnya Citarum-Progo-Kartini yang kemudian dialokasikan pada center tertentu untuk memudahkan pengelolaan serta menarik konsumen. Formalisasi PKL Kawasan Pasar Waru dianggap kurang sesuai bagi PKL karena ketidaksesuaian lokasi berjualan. Kawasan Pasar Waru memiliki aksesibilitas yang rendah karena sulit dijangkau menggunakan transportasi umum. Para pedagang yang berasal dari berbagai daerah di Kota Semarang juga menganggap bahwa lokasi Pasar Waru jauh dari konsumen karena tidak berada pada pusat kota sehingga konsumen kesulitan dalam menjangkaunya. Hal ini mengakibatkan hambatan pada aktivitas PKL sehingga mengakibatkan kerugian pada PKL. Kondisi ini mengakibatkan banyak PKL yang memilih untuk meninggalkan loss dan berjualan pada lokasi lain yang dianggap strategis. Akhirnya, keberadaan Pasar Waru sebagai kawasan resmi oleh pemerintah dianggap belum mampu mengoptimalkan salah satu sumber pendapatan daerah karena banyaknya *dead capital* sehingga pendapatan retribusi cenderung menurun. Adanya formalisasi tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan yang dapat digunakan untuk keberlanjutan aktivitas PKL dalam menghadapi tantangan masa mendatang. Apabila proses formalisasi berhasil diterapkan maka dampak negatif akibat keberadaan PKL dapat diminimalisasikan sehingga potensi PKL dapat menjadi optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam konteks waktu dan situasi tertentu (Sudjana, 2004). Pengumpulan data yang digunakan lebih banyak berasal dari data primer yang didapatkan melalui observasi lapangan dan wawancara. Narasumber yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah PKL di Kawasan Pasar Waru serta instansi maupun lembaga yang mengelola PKL agar mampu memperoleh data yang aktual mengenai pemenuhan kebutuhan PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah narasumber tak terbatas sampai informasi yang didapatkan dikatakan memenuhi kebutuhan data untuk analisis. Narasumber dipilih dengan menggunakan *homogenous sampling* yang didasarkan pada jenis barang dagangan yakni klithikan dan non klithikan di Pasar Waru. Kemudian, untuk memperluas informasi mengenai fenomena yang ada di Kawasan Pasar Waru, maka ditambahkan metode pencarian narasumber melalui *snowballing sampling*.

GAMBARAN UMUM

Kawasan Pasar Waru merupakan pasar yang terletak di Jalan Kaligawe Semarang dan dibangun oleh pemerintah untuk mengoptimalkan aktivitas PKL di Kota Semarang. Pasar Waru merupakan salah satu kawasan perdagangan dan jasa yang berada di kecamatan Gayamsari yang terletak pada BWK V Kota Semarang. Di dalamnya terdapat fungsi permukiman dengan kepadatan tinggi sehingga dilengkapi dengan fungsi fungsi penunjang lainnya, termasuk kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional.

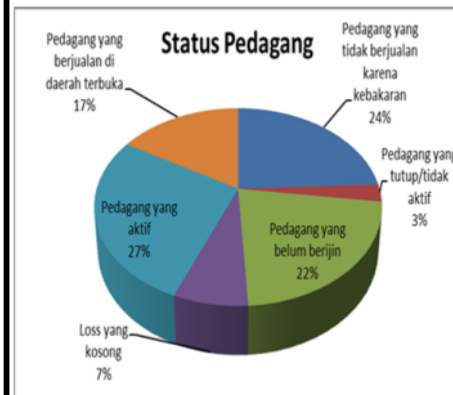


Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011

GAMBAR 1
LOKASI KAWASAN PASAR WARU

TABEL 1
JUMLAH PKL DI KAWASAN PASAR WARU (BELAKANG)

No	Data Pedagang	Jumlah
1	Eks Citarum (Klithikan)	230 pedagang
2	Eks Kartini Pakan Burung	124 pedagang
3	Eks Kartini Pakaian	80 pedagang



Sumber: UPTD Dinas Pasar, 2014

GAMBAR 2
STATUS PEDAGANG KAWASAN PASAR WARU

Pasar Waru merupakan salah satu Pasar yang lokasinya berdekatan dengan permukiman masyarakat. Pada awalnya, Pasar Waru hanya berfungsi sebagai pasar tradisional yang menjual barang kebutuhan sehari-hari sehingga hanya berskala lingkungan. Namun, pemerintah kemudian melakukan penataan PKL dengan menggunakan lahan di belakang Pasar Waru guna menampung pedagang dari Citarum, Progo dan Kartini Semarang dengan jumlah 434 pedagang. Oleh karena itu, jenis barang dagangan yang diperjualbelikan terdiri dari klithikan (barang bekas), pakaian serta makanan burung dan hewan. Namun, jumlah pedagang yang berjualan di kawasan ini semakin menurun. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas menuju kawasan ini yang cukup sulit, banjir serta berbagai permasalahan lain yang menyebabkan aktivitas di kawasan ini terganggu. Hingga saat ini jumlah pedagang yang berjualan hanya mencapai setengah dari jumlah awalnya.

KAJIAN TEORI

Sektor Informal

Sektor informal didefinisikan sebagai cara untuk melakukan sesuatu yang bercirikan mudah dimasuki, bergantung pada sumberdaya lokal, kepemilikannya adalah keluarga, kegiatan berskala kecil, teknologi adaptif, ketrampilan dalam menjalankan usahanya diperoleh di luar sektor formal serta tidak diikat oleh peraturan tertentu. Sektor informal selalu muncul karena menjadi ladang pekerjaan bagi migran lain untuk menciptakan aktivitas informal baru (Soetomo, 2009).

PKL (Pedagang Kaki Lima)

Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Formalisasi PKL

Proses formalisasi aktivitas PKL memiliki arti legalisasi dalam setiap aktivitasnya. Legalisasi tersebut terdiri dari provisi kepemilikan, ijin prosedural, kebutuhan rencana dengan tujuan formalisasi pasar serta mengaktifkan blokade dari *dead capital* akibat *human capital* yang kurang berkembang (Potsiou, 2013). Sedangkan menurut Rukhayah (2010). Formalisasi PKL memiliki arti peningkatan potensi lokasi menjadi wadah akumulasi warga dengan barang dagangan apapun yang dijual disertai dengan peningkatan omzet. Konsep formalisasi PKL pada tidak hanya fokus pada lokasi yang telah dilegalkan oleh pemerintah, tetapi juga formalisasi pengelolaan pedagang sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan pedagang maupun kota secara umumnya. Dengan formalisasi diharapkan aktivitas PKL menjadi lebih tertata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN FORMALISASI PKL DI KAWASAN PASAR WARU SEMARANG

Berdasar pada **Analisis Kesesuaian Site** didapatkan ketidak seimbangan antara *supply* dan *demand* yang ada di kawasan Pasar Waru. Perdagangan pada skala lingkungan hanya melayani penduduk di lingkungan sekitar, sedangkan pada skala yang lebih besar seperti skala kawasan hingga skala kota, maka permintaan akan semakin luas dan variatif. Karakteristik berjualan PKL juga akan berpengaruh pada *supply demand*. Karakteristik barang dagangan yang spesifik menyebabkan pembeli akan lebih lebih luas karena lokasi yang dituju memiliki kriteria khusus dengan barang dagangan yang sulit didapatkan pada tempat lainnya. Di Kawasan Pasar Waru hanya berskala lingkungan sedangkan *demand*-nya berasal dari berbagai kota seperti Ungaran, Demak, Kudus, Pati dsb. Para pedagang banyak yang merasa kehilangan pelanggan akibat proses relokasi sehingga pendapatan sangat fluktuatif pada tahun pertama, bahkan tak jarang para pedagang berpendapatan minus. Hal ini disebabkan karena para pedagang harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan mulai mencari pelanggan baru (*demand* baru). Setelah beberapa tahun kemudian, pelanggan yang dimiliki para pedagang tidak hanya pelanggan lama tetapi juga pelanggan baru dari berbagai lokasi sehingga tak jarang pedagang yang mencoba untuk tetap melanjutkan aktivitasnya.

Kawasan Pasar Waru merupakan kawasan dengan topografi rendah dan daerah rawan banjir. Apabila musim hujan, aktivitas berjualan pedagang akan terhenti sementara karena ruang beraktivitasnya terendam oleh banjir. Jalan menuju kawasan ini juga terkena banjir sehingga

menyulitkan akses keluar–masuk. Lokasi kawasan Pasar Waru yang berada cukup menjorok dari jalan raya Sawah Besar mengakibatkan kawasan ini kurang aksesibel jika dibanding dengan kawasan perdagangan lain yang sejenis khususnya pedagang klithikan. Lokasi aktivitas pedagang klithikan berada di belakang pasar tradisional sehingga keberadaan pedagang klithikan cenderung tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kawasan Pasar Waru hanya terkenal sebagai pasar tradisional saja tanpa ada pedagang klithikan di dalamnya. Kondisi ini yang mengakibatkan banyak masyarakat baik konsumen maupun pedagang itu sendiri beraktivitas di kawasan ini sehingga kawasan ini kurang berkembang meskipun lokasinya telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah.



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

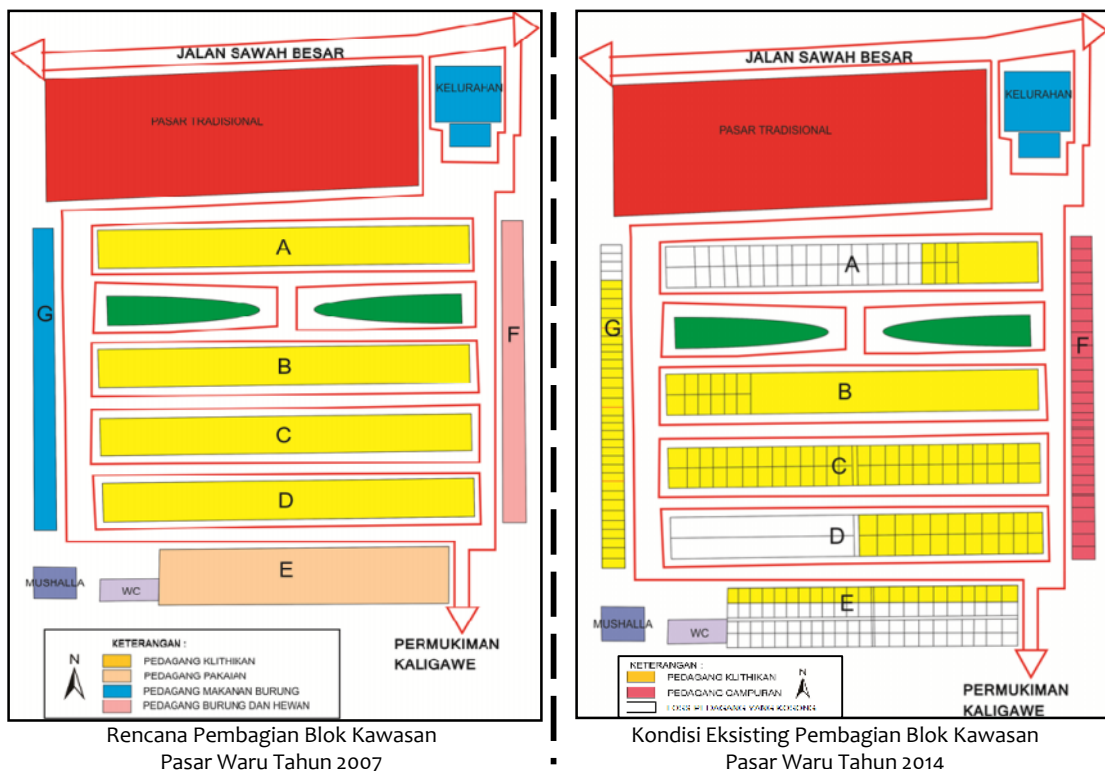
GAMBAR 3
KESESUAIAN SITE KAWASAN PASAR WARU

Berdasar pada **Analisis Karakteristik Formalisasi** dapat diketahui bahwa izin usaha menjadi alasan utama para pedagang tetap bertahan untuk berjualan. Setiap pedagang yang direlokasi ke kawasan Pasar Waru ini memiliki izin berjualan dan berstatus sebagai pedagang pasar di bawah payung Dinas Pasar Kota Semarang. Bahkan beberapa pedagang bersedia untuk dipindahkan jika kemungkinan kedepannya akan dilakukan revitalisasi asalkan ditempatkan pada lokasi yang dijamin oleh pemerintah. Dengan adanya izin usaha akan memberikan

manfaat langsung bagi pedagang khususnya dalam keamanan serta pengelolaan pedagang secara resmi di bawah wewenang pemerintah.

Jenis barang dagangan yang diperjualbelikan akan berpengaruh pada keberlangsungan aktivitas pedagang tersebut. Pedagang jenis klithikan di kawasan tersebut masih mendominasi karena jenis barang ini masih banyak diminati oleh konsumen terutama para pelanggan dari lokasi sebelumnya. Pada dasarnya, berjualan klithikan hanya membutuhkan modal yang sedikit bahkan tak jarang para pedagang menjual barang dari rumah saat tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli barang pasokan. Jenis barang dagangan juga berpengaruh dalam ikatan supplier yang ada.

Pada awalnya, formalisasi PKL dilakukan secara berkelompok sesuai dengan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan. Pada Gambar 4 dapat diketahui rencana awal pemindahan pedagang yang dikelompokkan menjadi 4 jenis barang dagangan yakni klithikan, makanan burung, pakaian dan hewan. Pedagang klithikan merupakan pedagang dengan jumlah loss terbanyak karena merupakan perpaduan dari PKL Citarum dan Kartini (230 pedagang). Pedagang pakaian berasal dari daerah Kartini dan direncanakan menempati loss bagian belakang yang berjumlah 80 unit. Sedangkan pedagang makanan burung dan hewan menempati sisi kanan kiri kawasan Pasar Waru dengan jumlah 124 pedagang. Namun, kondisi di kawasan tersebut tidak berkembang sesuai dengan rencana. Banyak pedagang yang tidak laku dan memilih untuk pindah. Sebagian pedagang Kartini juga pindah kembali ke lokasi semula karena lokasi di kawasan Pasar Waru ini dianggap kurang strategis sehingga tidak menguntungkan. Pada kawasan saat ini, banyak loss yang tidak digunakan. Semenjak peristiwa kebakaran, banyak loss yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan dibiarkan begitu saja.



GAMBAR 4
PERBANDINGAN PEMBAGIAN BLOK
KAWASAN PASAR WARU

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

Pada awal formalisasi, sarana berjualan yang digunakan pedagang di kawasan Pasar Waru adalah loss terbuka yang kemudian dibagi sesuai dengan jumlah pedagang yang ada. Secara keseluruhan, bentuk formalisasi pedagang pada sarana berjualan yang digunakan kurang memadai. Pemerintah hanya menyediakan sarana berjualan dalam bentuk loss yang kemudian dikelola oleh pedagang termasuk dengan pembangunan secara swadaya untuk menjadi kios.

Begitu pula dengan pedagang yang terkena kebakaran, sarana berjualan pedagang dipindahkan sementara ke lokasi yang masih belum digunakan sehingga aktivitas pedagang masih berjalan. Para pedagang yang pindah banyak yang memilih untuk menjual tempatnya berjualan. Pedagang tersebut melakukan jual beli sesama pedagang seperti pihak ketiganya, baik pada pedagang baru ataupun pada pedagang yang memilih untuk tetap bertahan di kawasan Pasar Waru. Pada akhirnya banyak terdapat pedagang baru yang bukan berasal dari lokasi pindahan sebelumnya dan terdapat fenomena kepemilikan lahan ganda, yakni pedagang memiliki lahan lebih dari 1 lahan. Meskipun banyak pedagang yang pindah, tak jarang pedagang yang masih bertahan justru memilih untuk memperbanyak kepemilikan loss terutama untuk pedagang jenis non klithikan. Umumnya, pedagang yang memiliki lebih dari 1 tempat berjualan disebabkan karena anggapan bahwa tempat berjualan sebagai kelebihan dari investasi.



Sarana Berjualan setelah di kavling



Sarana Berjualan menggunakan lapak terbuka



Sarana Berjualan yang Terbakar

Sumber: Observasi, 2014

GAMBAR 5 SARANA BERJUALAN PEDAGANG

Dalam formalisasi aktivitas pedagang kaki lima harus mempertimbangkan sarana prasarana yang akan digunakan pada lokasi berikutnya. Pada kawasan Pasar Waru, kondisi infrastruktur memang sudah ada tetapi kondisinya kurang memadai. Seperti pada prasarana air bersih, kurang memadai karena kondisinya yang kurang baik. Peningkatan status PKL menjadi pedagang pasar kawasan Pasar Waru juga berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur kawasan. Berbeda dengan PKL, penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas berjualan disediakan oleh pemerintah. Para pedagang harus membayar retribusi atas penggunaan infrastruktur yang disediakan pemerintah. Retribusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang nantinya akan menjadi pendapatan daerah. Besaran retribusi yang dibayarkan bergantung luas dan jumlah loss yang dimiliki.

Secara keseluruhan, terdapat perbedaan omzet dan modal antara pedagang klithikan dan pedagang non klithikan. Pedagang non klithikan seperti pedagang pakaian, elektronik dan hewan memiliki omzet yang lebih besar dikarenakan jumlahnya yang tidak banyak sehingga pesaingnya juga tidak banyak pula. Selain itu, jenis barang dagangan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sehingga kemungkinan terjadinya transaksi jual beli akan lebih sering jika dibandingkan dengan pedagang klithikan. Meskipun demikian, pedagang klithikan masih mampu bertahan berjualan karena modal yang digunakan lebih kecil sehingga mempermudah

perputaran uang untuk beraktivitas. Meskipun tanpa bantuan dari pemerintah, jenis pedagang ini masih mampu bertahan dengan mengcover kebutuhan secara individual. Pedagang non klithikan hanya memiliki konsumen dan supplier dengan jangkauan yang lebih sempit sedangkan pedagang klithikan umumnya memiliki jangkauan konsumen yang lebih luas hingga luar kota. Untuk pedagang klithikan memiliki kemudahan dalam menjangkau supplier karena adanya aglomerasi barang dagangan sejenis.

Berdasar pada **Analisis Manfaat Formalisasi** maka didapatkan bahwa formalisasi memberikan suatu keuntungan yang bersifat psikologis maupun bersifat real bagi pedagang, khususnya dalam keamanan dan kenyamanan pedagang. Dengan formalisasi maka pedagang memiliki kejelasan hukum dan kepastian akan wewenang hukum sehingga aman dari pengurusan. Para pedagang tidak perlu khawatir tidak dapat berjualan karena telah berjualan pada lokasi yang ditetapkan pemerintah. Keuntungan formalisasi lainnya dapat dinilai dari segi kenyamanan. Lokasi berjualan PKL sebelumnya berada di pinggir jalan dengan fasilitas yang terbatas sedangkan di lokasi baru, pemerintah berusaha menyediakan sarana prasarana yang sesuai. Selain itu, pedagang juga memiliki keuntungan lokasi akibat aglomerasi pedagang yang sejenis. Manfaat formalisasi bagi masyarakat luas adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan adanya simbiosis yang menguntungkan sesama pedagang meskipun barang yang diperdagangkan berbeda jenis. Dengan demikian, keberadaan formalisasi PKL memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari lingkungan terkecil yakni keluarga hingga ke skala lebih besar untuk taraf hidup sejahtera melalui fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Pada **Tabel 2** dibawah ini menjelaskan mengenai sintesa dari analisa yang telah dilakukan sebelumnya. Pada analisa kesesuaian menunjukkan bahwa ruang yang digunakan untuk beraktivitas PKL di kawasan tersebut kurang sesuai untuk mendukung perkembangan kawasan.

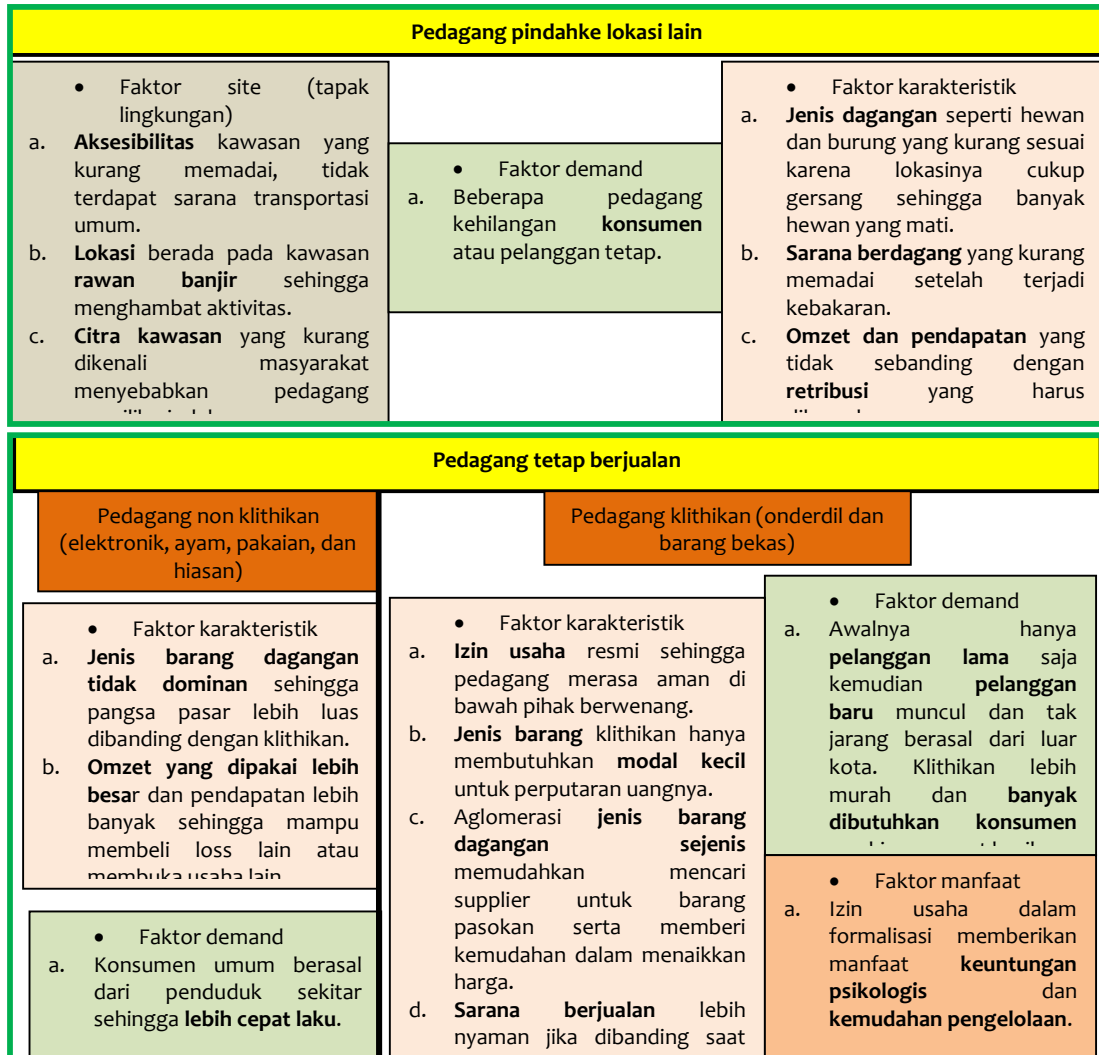
TABEL 2
SINTESA KAJIAN FORMALISASI PKL KAWASAN PASAR WARU SEMARANG

No.	Sasaran	Kajian	Keterangan	Rumusan
1.	Kesesuaian Ruang Beraktivitas PKL di Kawasan Pasar Waru Semarang	Kesesuaian Ruang berdasar supply demand	Ketidakseimbangan antara <i>supply</i> dan <i>demand</i> khususnya bagi pedagang yang baru diformalisasikan sehingga belum mampu mendukung kelancaran aktivitas jual beli yang ada.	Berdasar pada kajian kesesuaian ruang maka kawasan Pasar Waru pada dasarnya kurang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan karena terdapat permasalahan terkait site maupun <i>supply demand</i> meskipun menurut kebijakan pemerintah telah memenuhi.
		Kesesuaian ruang berdasar site	Kurang sesuai karena site kawasan masih memiliki permasalahan banjir dan rob, aksesibilitas kurang, sarana transportasi belum memadai.	
		Kesesuaian ruang berdasar kebijakan pemerintah	Sesuai dengan rencana pola ruang dan fungsi kawasan yang ditetapkan pemerintah	
2.	Formalisasi Karakteristik Berjualan PKL	Latar belakang formalisasi	Relokasi pedagang dilakukan karena lokasi berjualan sebelumnya mengganggu kepentingan umum karena menggunakan fasilitas umum yang tidak sesuai	Formalisasi PKL menjadi pedagang di kawasan Pasar Waru memberikan perubahan mendasar pada karakteristik berjualan para pedagang dibanding lokasi sebelumnya. Perubahan karakteristik yang paling terlihat adalah sarana
		Formalisasi jenis barang dagangan PKL	Tidak ada perbedaan barang dagangan saat menjadi PKL maupun setelah perubahan status menjadi	

No.	Sasaran	Kajian	Keterangan	Rumusan
			pedagang.	berdagang, penyediaan infrastruktur, izin usaha dan retribusi yang dibayarkan oleh pedagang klithikan tersebut.
		Formalisasi sarana berdagang PKL	Bentuk formalisasi pedagang pada sarana berjualan yang digunakan kurang memadai.	
		Formalisasi kepemilikan loss PKL	terjadi perbedaan antara pedagang dan pemerintah. Pemerintah menyatakan bahwa tempat berjualan tidak dapat diperjualbelikan. pedagang beranggapan bahwa proses jual beli tempat berjualan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
		Formalisasi untuk penyediaan infrastruktur	formalisasi memberikan kemudahan bagi para pedagang khususnya dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur oleh pemeerintah jika dibandingkan dengan saat sebelumnya berjualan sebagai PKL	
		Formalisasi izin usaha PKL	Formalisasi dalam bentuk perijinan menyebabkan para pedagang berbeda dengan PKL sebelumnya.	
		Formalisasi omzet dan permodalan PKL	Pemerintah tidak menyediakan bantuan dalam bentuk peminjaman modal bank (sistem kredit ringan) yang membantu pedagang.	
		Formalisasi dalam distribusi barang dagangan PKL	Tidak ada perluasan jaringan supplier saat berjualan di lokasi formal ini sehingga tidak ada perbedaan dengan sektor informal pada umumnya.	
		Formalisasi pembayaran retribusi PKL	Formalisasi PKL menjadi pedagang Pasar Waru memberikan perbedaan dengan saat menjadi PKL sebelumnya karena harus membayar retribusi	
3.	Peranan Formalisasi dalam Aktivitas PKL	Peran formalisasi bagi aktivitas PKL	Terdapat dampak negatif maupun positif yang terjadi akibat formalisasi bagi pedagang.	Formalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk menciptakan keuntungan psikologis yakni keamanan dan kenyamanan pedagang serta memberikan dampak yang lebih luas untuk kawasan sekitarnya.

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan Pasar Waru terdapat fenomena pedagang yang pindah karena berbagai alasan. Penyebabnya antara lain karena site, demand dan karakteristik barang dagangan yang diperjualbelikan. Berdasar pada analisis site, maka penyebab pedagang enggan berjualan di kawasan tersebut antara lain Kawasan Pasar Waru termasuk kurang strategis karena sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya mengenai transportasi menuju kawasan tersebut. Belum lagi permasalahan mengenai banjir yang terjadi setiap tahunnya mampu menghentikan aktivitas pedagang hingga berminggu - minggu lamanya. Akibatnya para pedagang banyak yang merugi karena pendapatan yang dihasilkan tidak sebanding dengan pengeluaran termasuk retribusi yang harus dibayarkan sehingga para pedagang memilih untuk pindah keluar ke lokasi yang lebih strategis.



Sumber: Analisis Penyusun, 2014

GAMBAR 6
PENYEBAB PEDAGANG PINDAH DAN MENETAP

Meskipun banyak pedagang yang pindah dari kawasan ini, masih ada pedagang yang memilih untuk bertahan. Penyebab utama para pedagang masih bertahan adalah adanya izin usaha yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, faktor jenis barang dagangan akan mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang. Pedagang jenis klithikan memanfaatkan aglomerasi lokasi barang untuk memudahkan pencarian supplier dan menentukan harga jual. Jenis barang dagangan ini juga hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit untuk memulai usaha sehingga masih mampu bertahan. Sedangkan pedagang non klithikan, masih tetap bertahan karena aktivitas jual belinya menghasilkan pendapatan yang besar karena jenis barang dagangannya lebih cepat laku dibanding lokasi sebelumnya.

KESIMPULAN

Formalisasi di Kawasan Pasar Waru dilakukan dengan memindahkan pedagang yang berasal dari Citarum – Kartini – Progo. Pada awalnya, jumlah pedagang yang di formalkan berjumlah

434 pedagang, namun jumlah tersebut terus menurun dan saat ini hanya ada setengahnya saja. Banyak pedagang yang pindah keluar dari kawasan tersebut dengan alasan lokasi yang kurang memadai karena banjir serta minimnya aksesibilitas menuju kawasan tersebut. Namun, banyak juga pedagang yang memilih untuk tetap berjualan. Bentuk formalisasi pedagang di kawasan Pasar Waru terlihat dari peningkatan status pedagang dari semula hanya PKL menjadi pedagang pasar formal. Izin usaha menjadi salah satu penyebab PKL masih bertahan untuk berjualan di kawasan tersebut meskipun lokasi yang digunakan pedagang tersebut kurang mendukung. Keberadaan izin usaha memberikan keuntungan psikologis bagi pedagang karena beraktivitas dalam “payung legal”. Formalisasi menghasilkan perbedaan dengan sektor informal khususnya pada sarana berdagang, penyediaan infrastruktur, izin usaha dan retribusi yang dibayarkan oleh pedagang tersebut.

Diperlukan penyediaan sarana transportasi yang dapat dilakukan dengan kemitraan pemerintah dan swasta dan sarana pendukung aktivitas pedagang termasuk perbaikan sistem drainase sehingga keberlangsungan aktivitas pedagang dapat terjamin. Perlunya integrasi aktivitas kawasan Pasar Waru untuk memperluas pangsa pasar serta memperkenalkan aktivitas Kawasan Pasar Waru pada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pasar Kota Semarang. 2008. *Buku Saku Panduan PKL*.
- Potsiou, Chryssy. 2013. *Policies for formalization of informal development: Recent experience from southeastern Europe* dalam *Land Use Policy*. www.elsevier.com/locate/landusepol.
- Recio, Rodento dan José Edgardo A Gomez, Jr. 2013. *Street Vendors, their Contested Spaces, and the Policy Environment: A View from Caloocan, Metro Manila* dalam *Jurnal National Institute of Urban Affairs*. <http://eua.sagepub.com/>.
- Rukhayah, Siti. 2010. *Simbiosis Ruang Terbuka Kota di Simpang Lima Semarang*. Disertasi tidak diterbitkan, Program Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sudjana, 2004. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.
- Surya, Octora Lintang. 2013. *Formalisasi PKL Simpang Lima Semarang*. Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutomo, Soegiyono. 2009. *Urbanisasi dan Morfologi : Proses Perkembangan Peradaban dan Wadah Ruangnya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.